

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad – II, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993)
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Agus Simanjuntak, *Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2023)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008)
- Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- E. Allan Farnsworth and William F. Young, *Contracts (Cases and Material)*, (New York: The Foundation Press Inc., 1995)
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan: Sofmedia, 2015)
- H. Salim H. S, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- H. Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2018)
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, kewenangan, dan perbandingan dengan negara lain*, (Konstitusi Press, 2018)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999)
- Johannes Gunawan, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007)
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Marko Cahya Sutanto, *Prospek Penggunaan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai Model Pembentukan Hukum Kontrak Jual-Beli Barang Internasional-Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2019)
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993)
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Jakarta: Alumni, 1994)
- Moch. Isnaeni *et.all*, *Dinamika Pemikiran Pakar Hukum Indonesia*, (Setara Press: Malang, 2024)
- Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muhammad Syaifuddin, *et.all*, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003)

- P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, (New York: Oxford University Press, 1996)
- Paulus Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Indonesia, 1997-1998)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015)
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Rosa Agustina, *et.all, Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012)
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2019)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2020)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2021)

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

## B. JURNAL

Anita Niru Sinaga dan Nurleley Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Melaksanakan Perjanjian” *Jurnal Mitra Manajemen*, (2020)

Cakra Putra Negara, Revalina Annisa Anyoine, Evi Mutiara Marpaung, Christine T Purba, Yuliana Munthe, “Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 9, No. 2, (2022)

Febi Adnesia Angraini, Idqan Fahmi, Kemal Heryandri, Ruddy Suwandi, “Perancangan Pengukuran Kinerja Terminal Ferry Sekupang Dengan Metode *Balanced Scoreboard*”, *Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 26, No. 9, (2014)

Haryo Sulisyantoro dan Eko Wahyudi, “Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi dengan Metode Pendekatan Sistem)”, *Liga Hukum FH-UPNV Jatim*, Vol. 2, (2010)

M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, (2014)

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, (2019)

Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra dan Erich Widjaja Kurniawan, “Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak” *Jurnal Notaire*, Vol. 2, No. 2, (2019)

Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Mazhaib*, Vol. 14, Issue 1, (2015)

Ridwan Khairandy, “Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, *Jurnal Hukum UII*, Edisi Khusus Vol. 18, (2011).

Ronald Fadly Sopamena, “Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2021)

Siti Rafika Ilhami, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi”, Jurnal *Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vo. 1, No. 1, (2015)

Yunanto, “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian”, Jurnal *Law Development & Justice Review*, Vol. 2, No. 1, (2019)

### **C. HASIL PENELITIAN**

Viva Ayunita Kusumandari, “Penyelesaian Dualisme Kewenangan Pengelolaan Kota Batam Antara BP Batam Dan Pemerintah Kota Batam Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus”. Tesis, Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

Philipus M. Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum”, Malang, Penataran dan Lokakarya Sehari “Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif”, 1997

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003)
- Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tahun 2022
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3261)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643)

- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 56)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 2006
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 945 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Kepada PT Citra Tunas Untuk Mengoperasikan Pelabuhan TF Harbour Bay Sebagai Pelabuhan Umum
- Perjanjian Kerjasama untuk Membangun, Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry Internasional Sekupang Dengan Mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) Nomor 12/PERJ-KA/VIII/2004, Nomor 111/IDC-OB-SP-BOT-SKP-VIII-2004 antara PT Indodharma Corpora dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 20 Agustus 2004
- Kesepakatan Bersama tentang Sumbangan Hasil Penerimaan Jasa Pas Penumpang (*Passenger Departure Fee*) di Pelabuhan Umum Penumpang Internasional Nomor 112/KB-SKP/IDC-ST-PKB/XII/2007, Nomor 006/PUPIBC-DIR-PERJ/XII/2007, Nomor 28/MoU/HK/XII/2007 antara PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada dan Pemerintah Kota Batam tanggal 28 Desember 2007
- Kesepakatan Bersama tentang Sumbangan Hasil Penerimaan Jasa Pas Penumpang (*Passenger Departure Fee*) di Pelabuhan Umum Penumpang Internasional Nomor 112A/KB-SKP/IDC-ST-PKB/II/2008, Nomor 113A/PUPIBC-DIR-PERJ/II/2008, Nomor 02/MoU/HK/II/2008 antara PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada dan Pemerintah Kota Batam Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Batam tanggal 15 Februari 2008
- Perubahan Perjanjian Kerjasama untuk Membangun, Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry Internasional Sekupang dengan Mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) Nomor 1/PERJ-KA/1/2010, Nomor 010/IDC-OB/ADD/BOT/SKP/I/2010 antara PT Indodharma Corpora dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tanggal 11 Januari 2010



Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama untuk Membangun, Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry Internasional Sekupang dengan Mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) Nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022, Nomor 056/IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022 antara PT Indodharma Corpora dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tanggal 25 Oktober 2022

Berita Acara Musyawarah antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Indodharma Corpora tanggal 14 September 2022

Berita Acara Kesepakatan Nomor 15/A4/9/2022, Nomor 01-BA/IDC/IX/2022 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Indodharma Corpora tanggal 29 September 2022

Berita Acara Kesepakatan Nomor 164/A4/10/2022, Nomor 03-BA/IDC/X/2022 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Indodharma Corpora tanggal 25 Oktober 2022

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Laporan Hasil Evaluasi atas Perjanjian Kerjasama untuk Membangun, Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry Internasional Sekupang Dengan Mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) Nomor 12/PERJ-KA/VIII/2004, Nomor 111/IDC-OB-SP-BOT-SKP-VIII-2004 antara PT Indodharma Corpora dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 20 Agustus 2004*, (Jakarta: BPKP, 2008)

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188. 342/494/SJ kepada Gubernur Kepulauan Riau tanggal 09 Februari 2009 perihal Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008

## **E. PUTUSAN**

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Perkara Nomor: 46030/VII/ARB-BANI/2023 tanggal 18 Desember 2023

## **F. WEBSITE / INTERNET**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tentang BANI, Sejarah. [diakses pada 4 Desember 2024].

<https://baniarbitration.org/about-bani/history>

Badan Pengusahaan Batam. Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau. [diakses pada 26 September 2024].

<https://bpbatam.go.id/tentang-batam/sejarah-batam/>.

Badan Pengusahaan Batam. Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam. [diakses pada 26 September 2024].

<https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/>

Badan Pengusahaan Batam. Tugas dan Fungsi. [diakses pada 28 September 2024].

<https://bpbatam.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>.

## G. KAMUS / ENCYCLOPEDIA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*,  
<https://www.kbbi.web.id/>

*The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed.*,  
<https://thelawdictionary.org/law/>

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition* (West Group, St. Paul. Minn, 1999)

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Tenth Edition* (tenth, West Publishing Company, 2008)

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Eleventh Edition* (eleventh, West Thomson Reuters, 2014)

Henry Campbell Black, 1991. *Black Law Dictionary, Definitions of the terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, West Publishing Co., St. Paul Minn.

Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)

N.E. Algra, *et.all*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983)

Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu

## H. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Junaedi Saibih, pengajar Hukum Acara, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Tanggal 17 November 2023. Pukul 11.00 Wib.